

Voter Participation in the Election of the Head and Deputy Regional Head of Banjarmasin City in 2020 During the Covid 19 Pandemic

Pery*, Samahuddin, & Bachruddin Ali Akhmad

Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to find out and explain the causes of low voter participation in the election of the head and deputy regional head of Banjarmasin City in 2020 during the covid 19 pandemic. This study uses a qualitative approach with descriptive research type, data collection techniques using interviews and documentation, data analysis techniques data reduction, data presentation, conclusion drawing or verification, and the validity of the data source triangulation, technique mastulation and time triangulation. The results showed that the low voter participation in the election of the Head and Deputy Regional Head of Banjarmasin City in 2020 during the Covid 19 Pandemic was influenced by factors, namely the covid 19 factor, the weather/rain factor, the administrative factor, the work factor, and the habit factor. The low participation was due to not achieving the target set by the general election commission of the Republic of Indonesia, namely 77.5%, the target of the general election commission of Banjarmasin city of 75% was only achieved by 57.63% This research is expected to be a suggestion to election organizers to increase public awareness of the importance of voter participation in the 2020 Banjarmasin City Head and Deputy Regional Head Elections in the Covid 19 Pandemic Period in order to achieve the set targets.

Keywords: Participation, Voters, Pilkada, Covid 19 Pandemic.

1. Pendahuluan

Pelaksanaan partisipasi suatu proses demokrasi dalam kehidupan sebagai warga masyarakat indonesia. Yang sangat berperan adalah rakyat dalam menentukan pilihan yang layak duduk di jabatan politik seperti Kepala daerah. Partisipasi pada tahun 2020 yang berada pada rakyat dipercaya untuk memegang jabatan kepala daerah melalui pilkada yang umum. Dalam pelaksanaan ketertiban, kelancaran dan kepastian dan keamanan penyelenggaraan. Komisipemilihan umum kota Banjarmasin harus menetapkan pedoman teknis, Kota Banjarmasin 2020.

Pilkada serentak 2020 kota banjarmasin terdapat pada Kepala dan Wakil dipilih secara demokratis, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pemilihan rakyat punya hak memilih dipilih secara langsung yang didukung partai-partai politik maupun gabungan partai politik. Adapun sebagai dasar pilkada serentak pada tanggal 09 Desember 2020 adalah undang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dan PKPU Nomor 06 tahun 2020 adalah Pilkda Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Pelaksanaan gelaran pilkada serentak selanjutnya dilaksanakan yang diikuti 9 (sembilan), dan 270 (dua ratus tujuh puluh) Kabupaten/Kota, begitu hal yang sama dengan Provinsi Kalimantan Selatan, yang termasuk diikuti 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, dengan rincian sebagai berikut Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Dalam Pelaksanaan Partisipasi Pemilih Kota Banjaarmasin di pelaksanaannya ditengah-tengah pandemi covid tentu ini yang membedakan dengan pemilihan sebelumnya.

Tentunya pandemi covid 19 turut menjadi pertimbangan penting akan gelaran pilkada serentak tahun 2020 dan pemerintah menetapkan pada tanggal 09 Desember 2020. Beberapa penelitian telah dilakukan diantaranya menurut (Ahclak Asmara, 2018) Dengan judul Partisipasi politik masyarakat pada pilkda serentak 2015 di Kabupaten Gowa

* Corresponding author.

E-mail address: perymaria28@gmail.com

(Studi khusus terhadap pemilih pemula di Kel. Batang Kaluku, Kec. Somba Opu Kab Gowa)” dari Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan faktor partisipasi politik masyarakat pemilih pemula dan pemilih pemula sudah cukup serta dalam memberikan hak suaranya ketika pemungutan suara berlangsung dan sudah sangat tingginya keinginan masyarakat pemilih pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan pilkada, dengan harapan sosok pemimpin yang terpilih dapat membawa perubahan yang lebih baik, faktor mempengaruhi dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman politik merupakan sebagai penghambat sebagai salah satu faktor penghambat bagi masyarakat pemilih pemula dalam terlibat langsung dalam partisipasi masyarakat. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan dengan penelitian saya penelitian hanya mengambil berfokus pada partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19.

Menurut (Singestecia, 2018) Dengan judul “Partisipasi politik masyarakat tionghoa dalam pilkada di Slawi Kabupaten Tegal” dari Universitas Negeri Semarang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi poolitik masyarakat tionghoa dalam pemilihan kepala daerah yang mana kelurahan slawi wetan termasuk delegate power kewenangan masyarakat lebih tinggi dari pada penyelenggara negara dalam pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi politik masyarakat tionghoa dalam pemberian suara 95.58% dan tingkat partisipasi masyarakat dalam delegate power dan mereka berharap mendapat sosok pemimpin yang lebih baik untuk masa depan masyarakat. Perbedaan yang saya lakukan bahwa dalam penelitian ini berfokus pada suatu etnis minoritas di suatu daerah dan caranya berbeda. Penelitian saya tidak memfokuskan satu etnis atau suku tertentu.

(Huda, 2012) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul “Partisipasi masyarakat dalam pilkada 2012 Kabupaten Pati” (Studi kasus di desa Tegal Harjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”, dari Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Penelitian ini bertujuan merespon masyarakat terhadap pilkada kabupaten pati dan respon masyarakat pati cukup tinggi dalam partisipasi akan tetapi respn mereka tinggi di karenakan money politic. Sehingga pilkada rentan dengan adanya politik uang. Bahwa politik uang biasa menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Tegal Harjo adalah faktor hubungan masyaarakat dan calon, faktor politik seperti uang, faktor status sosial ekonomi dan faktor kondisi sosial politik. Perbedaan dengan penelitian saya hanya membahas Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala dan Wakil kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid 19.

Dalam penelitian (Akbar, 2016) yang berjudul “Partisipasi politik masyarakat dalam memilih Calon Bupati Goa pada Pilkada 2015 Kabupaten Goa” dari Universitas Hassanuddin Makassar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemilihan kepala daerah dimana pemilihan ini bertujuan untuk untuk mengetahui pemilihan kepala dan wakil daerah dimana kepala daerah merupakan anak dari petahana yang juga harus melawan tantenya sendiri dimana salah satu calon dari jalur independen memenangkan dalam pilkada tersebut yang membuat penelitian ini menarik diangkat. Masyarakat lebih percaya terhadap calon yang dari independen dan kurang percaya jalur independen. Perbedaan penelitian saya hanya membahas partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19.

Mahendra (2016) menjelaskan bahwa orientasi memilih tidak berdasarkan kepada primordialisme atau berkaitan dengan isu sara, melainkan berdasarkan pilihan rasional, yang dalam hal ini berkaitan dengan “keuntungan” yang didapatkan dari calon yang memberikan bantuan berupa sembako serta pembangunan infrastruktur desa. Perbedaan dengan penelitian saya partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19

2. Kajian Pustaka

2.1. Demokrasi

Demokrasi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat dan krotos/kratein yang berarti kekuasaan/berkuasa. Salah satu definisi mengenai demokrasi yang paling familiar berasal dari presiden Amerika Serikat ke 15, Abraham Lincoln yang mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. International Commission of Jurists dalam (Budiardjo, 1998) melalui konferensi di Bangkok merumuskan pengertian mengenai sistem politik yang demokratis serupa dengan pengertian dari Lincoln, yaitu sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka.

2.2. Pengertian Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “Participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikut sertaan (Echols, n.d.) Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses baik dalam bentuk pertanyaan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan atau pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi et al., 2020)

Partisipasi pemilih warga Negara merupakan indikator wujud demokrasi yang ideal dalam demokrasi. Di Negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, setiap warga negaranya berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik, karena setiap keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara, seperti yang dikemukakan oleh (Budiardjo, 1998), yang mendefinisikan Partisipasi pemilih adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Sedangkan menurut (As’ ari, 2006), secara umum partisipasi pemilih adalah kegiatan warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dalam menentukan pimpinan pemerintah. Mengacu pada kedua pendapat ahli diatas maka penulis berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh (Jalal & Supriadi, 2001) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuatan keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, ketrampilan, bahan dan jasa. Partisipasi pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. (Tilaar, 1998) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlu perencanaan dari bawah (bottom –up) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Di dalam Negara untuk ikut melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas politik maupun pemerintahan yang ada didalam negaranya. Kegiatan warga Negara dalam berpartisipasi politik ini pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu: mempengaruhi isi kebijakan umum yang telah dibuat oleh pemerintah bagi masyarakatnya dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya

2.3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Pemilih

Bentuk-bentuk partisipasi pemilih yang paling umum di kenal adalah pemungutan suara (Voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala Daerah (Saputra, 2017) jadi pemungutan hasil suara yang dipilih layak yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat. Jika mode bentuk-bentuk partisipasi bersumber faktor kebiasaan partisipasi pemilih disuatu zaman, maka bentuk-bentuk partisipasi pemilih mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Menurut (Huntington & Nelson, 1994) membagi bentuk-bentuk partisipasi pemilih yaitu sebagai berikut:

- (1) Kegiatan pemilihan adalah kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislative atau eksekutif atau tindak lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
- (2) Labby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
- (3) Kegiatan organisasi yaitu partisipasi individu kedalam suatu organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinya, guna mempengaruhi keputusan mereka;
- (4) Contacting yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
- (5) Tindakan kekerasan (Violence) yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda termasuk huru-hara, terror, kudeta, pembunuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

Sedangkan partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian” Dalam bahasa

inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi memilih berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Oktaviana et al., 2019)

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk-bentuk partisipasi memilih, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuat kebijakan pemerintah (Carolina, 2019)

Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi memilih seringkali hanya ditentukan secara pasif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat hakekatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi.

3. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, untuk menganalisis bagaimana Partisipasi Memilih Dalam Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid 19. Peneliti lebih menggunakan pendekatan karena diharapkan peneliti dapat menghasilkan uraian-uraian rinci dari hasil tulisan, ucapan, dokumentasi, dari setiap individu maupun fenomena, karena (Creswell, 2015) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami mana yang diteliti oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal masalah sosial atau kemauan manusia. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya yang penting seperti, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipasi, menganalisis secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara Reduksi Data (reduksi data), Display Data (penyajian data) dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (menarik kesimpulan) dengan informan sebanyak 7 orang orang diantaranya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin, Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Tokoh Agama Kota Banjarmasin, Tokoh Masyarakat Kota Banjarmasin, dan Ketua RT.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin pada tanggal 09 Desember 2020 mengacu pada Keputusan komisi pemilihan umum Kota Banjarmasin Nomor 46/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/VI/2020 Tentang perubahan atas keputusan pemilihan kota Banjarmasin Nomor 85/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman teknis tahapan, program dan penyelenggaraan pemilihan walikota dan walikota Banjarmasin tahun 2020. Sedangkan partisipasi memilih pada Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid 19 dengan Empat (4) pasang calon Kepala dan Wakil Kepala daerah adalah: Drs. H. Abdul Haris Makkie, M. Si dan Ilham Nor, ST perolehan suara 38875 suara atau (7.78%) Ibu Sina, S. Pi, M.si dan Dr. Ir. Arifin Noor, MT perolehan: 89378 suara atau (19.94%). Drs. H. Khairul saleh, M.si dan Habib Muhammad Ali Al' Habsy perolehan suara 29926 suara atau (6.67%). Hj. Ananda dan H. Mushaffa perolehan suara 81262 suara atau (18.13)

4.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Partisipasi memilih di Kota Banjarmasin pada pemilihan kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 merupakan suatu hal penting yang bertujuan untuk menentukan pemimpin yang mampu membawa Kota Banjarmasin kearah yang lebih baik. Namun dalam hal ini partisipasi memilih di Kota Banjarmasin hanya 55% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, Sedangkan target nasional yaitu di angka 77,5% .

Tabel I. Daftar rekapitulasi hasil memilih dan tidak memilih di kota banjarmasin tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih	Data Memilih	
			Tidak Memilih	Memilih
1	Banjarmasin Tengah	63.683	21.337	42346
2	Banjarmasin Utara	100.492	45.861	54631
3	Banjarmasin Timur	80.503	39.761	40742
4	Banjarmasin Selatan	107.783	48.068	59715
5	Banjarmasin Barat	95.698	47.561	48137
	Total	448.159	202.588 (45%)	245.571 (55%)

Partisipasi politik dimungkinkan, salah satunya adalah pemilihan kepala daerah yang merupakan sarana bagi rakyat untuk secara langsung mencapai demokrasi dalam menentukan keterwakilan daerah, dan Pilkada juga merupakan sarana untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Berdasarkan Tabel 1, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banjarmasin tahun 2020, pemilih berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor dalam menggunakan hak pilihnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian di daerah ini dan peneliti terkait dengan wawancara dengan nara sumber sejalan dengan teori yang dianut peneliti dalam penelitian ini bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Banjarmasin tahun 2020 belum mencapai tujuan nasional. Ada beberapa faktor utama yang menghambat masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, seperti faktor Covid 19, faktor cuaca, faktor administrasi, faktor pekerjaan dan faktor kebiasaan.

4.2.1. Faktor Covid 19

Pada pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19 kondisi kota Banjarmasin penyebaran Covid 19 sangat tinggi sekali dan di level 3 (tiga) hitam pekat. Sehingga ketakutan masyarakat kota Banjarmasin untuk keluar rumah, terutama orang tua dan manula di larang oleh anak-anaknya keluar rumah, dan termasuk orang memiliki penyakit bawaan.

4.2.2. Faktor Cuaca

Pada pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19 kondisi kota Banjarmasin penyebaran Covid 19, terjadi hujan di kota Banjarmasin di beberapa titik sehingga ada beberapa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya

4.2.3. Faktor Administrasi

Pada pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19 kondisi kota Banjarmasin penyebaran Covid 19, khususnya masyarakat yang pindah tempat tinggal tidak melaporkan tempat tinggal baru, masyarakat yang terkena gusur tidak melaporkan diri, masyarakat tidak memperbaharui data-data kependudukan, masyarakat tidak melaporkan atau mengurus akte kematian jika anggota keluarga yang sudah meninggal dunia.

4.2.4. Faktor Pekerjaan

Pada pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19 kondisi kota Banjarmasin penyebaran Covid 19, khusus bagi karyawan non formal/swasta mereka yang tinggal di kota Banjarmasin, tetapi bekerja di Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah tidak bisa menggunakan hak pilih sebab pada tanggal 09 Desember 2020 pelaksanaan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin tidak diliburkan.

4.2.5. Faktor Kebiasaan

Pada pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19 kondisi kota Banjarmasin penyebaran Covid 19, faktor kebiasaan sangat mempengaruhi hak pemilih terutama yang sering di tunggu tunggu baik oleh pengguna hak pilih maupun tim sukses masing-masing calon untuk meraih suara terbanyak.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah kota Banjarmasin tahun 2020 di masa pandemi covid 19 kondisi kota Banjarmasin penyebaran Covid 19, perlu mengadakan sosialisasi, sinkronisasi data pemilih tetap, dan perlu dibuatkan aturan bahwa pada pelaksanaan pilkada khusus pegawai/swasta diliburkan.

References

- Ahclak Asmara, Y. (2018). *Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi terhadap Pemilih Pemula di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Akbar, M. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten*

Gowa. *Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin*.

- As' ari, D. K. (2006). *Kamus istilah politik & kewarganegaraan*. Yrama Widya.
- Budiardjo, M. (1998). *Partisipasi dan partai politik: sebuah bunga rampai*. Yayasan Obor Indonesia.
- Carolina, C. (2019). *Pengaruh Balanced Score Card, Motivasi Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset*. Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*.
- Echols, J. M. (n.d.). dan Hassan Shadily. 2005. *Kamus Inggris Indonesia*.
- Huda, S. (2012). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*. *Tugas Akhir Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*.
- Jalal, F., & Supriadi, D. (2001). *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Diterbitkan atas kerjasama Depdiknas, Bappenas, Adicita Karya Nusa.
- Mahendra, I. W. S. (2016). *Orientasi Memilih Calon Dan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Wirata Agung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Lampung Tengah TAHUN 2015*.
- Oktaviana, A. W., Suharno, S., & Widarno, B. (2019). *Pengaruh Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta)*. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3).
- Saputra, R. (2017). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2014*. Riau University.
- Singestecia, R. (2018). *Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah di Slawi Kabupaten Tegal*. *Unnes Political Science Journal*, 2(1), 63–72.
- Sumaryadi, I. N., Hasan, E., & Lukman, S. (2020). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Suku Baduy Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 3(2), 130–145.
- Tilaar, H. A. R. (1998). *Beberapa agenda reformasi pendidikan nasional dalam perspektif abad 21*. IndonesiaTera.